



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan melakukan penyesuaian serta menata kembali Qanun Kota Langsa yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

22. Peraturan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan /lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kota.
13. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
14. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Kota yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
15. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Kota yang memberikan layanan medis spesialisik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kota Langsa yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien.
19. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
20. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
21. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Gampong yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

22. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan Penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan /atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
24. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau layanan penunjang medik dan/atau layanan penunjang keperawatan, dan /atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan Hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
27. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
29. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di dalam Daerah.
32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. Becak adalah kendaraan bermotor beroda tiga dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping.
35. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk losd dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

36. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar.
37. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
38. Losd adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
39. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
40. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.
41. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan baik bagi kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain -lain).
42. Pedagang Keliling adalah penjual di dalam pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap.
43. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran losd, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
46. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
47. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
48. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang -barang khusus.
49. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
50. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

51. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
52. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
55. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
56. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
57. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
58. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
59. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
60. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
61. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
62. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
63. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
64. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
65. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.

66. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
67. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
68. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
69. Mobil air kotor/tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja.
70. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja.
71. Alat pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
72. Alat perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (foam), kimia kering (dry powder), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
73. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulungan dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
74. Spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
75. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
76. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
77. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota Langsa.
78. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasa dan/atau denda.

82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
83. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah Dan Retribusi yang sedang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk

Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

Pasal 11

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu /Surat Keterangan, Tempat Tinggal ;
- c. Kartu/Surat Keterangan, Identitas Kerja ;
- d. Kartu/ Surat Keterangan, Penduduk Sementara ;
- e. Kartu/ Surat Keterangan, Penduduk Musiman ;
- f. Kartu Keluarga (KK) ;
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan (AP), Akta Perceraian (AC), Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama (AGN) bagi Warga Negara Asing (WNA), dan Akta Kematian (AKM).

Pasal 12

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati Jasa Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dicetak.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan dan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan /menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya Operasional.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat Kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, dan kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Pasar dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna layanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala; dan
 - b. uji ulang.
- (4) Selain Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

Pasal 29

- (1) Pengujian berkala yang pertama kali dilakukan terhadap:
 - a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kincup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu kendaraan;
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (*speedometer*);
 - g. spesifikasi teknis kaca.
- (2) Pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap:
 - a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kincup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu kendaraan;
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (*speedometer*);
 - g. kadar emisi gas buang mesin;
 - h. spesifikasi teknis kaca.

Pasal 30

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Pasal 32

Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Tanda jati diri pemilik (Kartu Tanda Penduduk);
 - c. Bukti pelunasan retribusi uji;
 - d. Memiliki sertifikat uji mutu;
 - e. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA);
 - f. Surat Uji Trayek;
 - g. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

Pasal 35

Bukti Pengujian Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 36

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 39

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 40

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 45

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 46

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis hydrant, jenis sprinkler, jenis satuan alat kendaraan, jenis satuan air bertekanan, jenis racun api.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Khusus untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan pantai, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

Pasal 51

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

Pasal 52

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala /ukuran, bentuk dan jumlah peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan dan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus

Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Kota.

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
 - b. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pendidikan/pelatihan di sarana pelayanan Pendidikan Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pendidikan/Pelatihan diukur berdasarkan jenis pelayanan Pendidikan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pendidikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Operasi dan pemeliharaan biaya jasa, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 68

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 69

Retribusi Jasa Umum dipungut di dalam wilayah Kota Langsa.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 70

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 72

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3
Sanksi Administratif

Pasal 73

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 74

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 77

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 81

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 83

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan

Perundang-undangan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 88

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 87 merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksana akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 92

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).
- b. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).
- c. Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11).

d. Qanun

- d. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 93

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I-A:
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSAT KESEHATAN DESA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

A. TARIF RAWAT JALAN PER PASIEN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Pelayanan dokter umum	Rp 2,200	Rp 2,800	Rp 5,000	Rp 10,000
2	Pelayanan dokter ahli	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 9,500	Rp 20,000

B. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Tindakan Kecil I	Rp 6,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 20,000
2	Tindakan kecil II	Rp 7,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 25,000
3	Tindakan sedang	Rp 20,100	Rp 26,800	Rp 20,100	Rp 67,000
4	Tindakan besar	Rp 30,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 100,000

C. TARIF TINDAKAN PADA PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Perawatan luka biasa	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
2	Perawatan luka bakar < 5%	Rp 2,500	Rp 10,000	Rp 12,500	Rp 25,000
3	Perawatan luka bakar 5-10%	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 50,000
4	Perawatan luka bakar > 10%	Rp 10,000	Rp 40,000	Rp 50,000	Rp 100,000
5	Kateterisasi kandung kemih	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
6	Incisi	Rp 1,500	Rp 6,000	Rp 7,500	Rp 15,000
7	Pemasangan dan pencabutan alat Kontrasepsi	Rp 15,000	Rp 67,500	Rp 67,500	Rp 150,000

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN GIGI

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Cabut satu gigi sulung	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
2	Cabut satu gigi sulung topikal	Rp 1,600	Rp 3,200	Rp 3,200	Rp 8,000
3	Cabut satu gigi tetap	Rp 4,000	Rp 8,000	Rp 8,000	Rp 20,000
4	Cabut satu gigi tetap dengan komplikasi	Rp 6,000	Rp 12,000	Rp 12,000	Rp 30,000

5	Odontektomi	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 150,000
6	Penambalan satu gigi sementara	Rp 3,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 15,000
7	Pulp capping	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
8	Pengisian perawatan endo	Rp 3,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 15,000
9	Tambalan resin komposit	Rp 6,000	Rp 12,000	Rp 2,000	Rp 20,000
10	Scaling per Regio	Rp 4,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 24,000
11	Uper colektomi	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 50,000
12	Eksterpasi mucocele	Rp 20,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 100,000
13	Pre pelayananasi	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
14	Incisi Abcess	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 25,000

E. TARIF RAWAT INAP / HARI

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Puskesmas rawat inap per hari	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 85,000
2	Tarif penggunaan oxygen per jam		Rp 5,000	Rp -	Rp 5,000

F. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian	BHP (Rp)	Jasa Puskesmas (Rp)	JPM (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Darah Routine	Haemoglobin	34,000	8,000	16,000	58,000
		Lecocyte	5,500	1,000	2,000	8,500
		Haematocyt	4,500	1,000	2,000	7,500
		Erythrocyt	4,000	1,000	2,000	7,000
		Laju Endap Darah	4,500	1,000	2,000	7,500
		Trombocyte	3,500	1,000	2,000	6,500
		Blood Grop	3,500	1,000	2,000	6,500
		Dift Conent	5,000	1,000	2,000	8,000
		2	HB Ulang / Darah Routine Ulang	HB Ulang Haemoglobin Lecocyte Haematocyt Erythrocyt Trombocyte	22,500	5,000
3	Laju Endap Darah	Laju Endap Darah	3,500	1,400	2,100	7,000
4	Blood Grop	Blood Grop	3,500	1,000	1,500	6,000
5	Dift Conent	Dift Conent	5,000	1,200	1,800	8,000

6	Urine	Urine	7,000	1,600	2,400	11,000
7	Lipid Profile	Trigly Cerida	78,500	12,200	18,300	109,000
		Cholesterol	33,000	7,600	11,400	52,000
		HD Cholesterol	12,500	2,200	3,300	18,000
			33,000	2,400	3,600	39,000
8	Trigly Cerida	Trigly Cerida	33,000	7,600	11,400	52,000
9	Cholesterol	Cholesterol	12,500	2,200	3,300	18,000
10	RFT	Urium Creatinin Uric Acia	60,000	8,000	12,000	80,000
11	Urium & Creatinin	Urium Creatinin	36,000	5,600	8,400	50,000
12	Uric Acid	Uric Acid	24,000	2,400	3,600	30,000
13	LFT	Bilirubin T / D	39,000	10,400	15,600	65,000
		SGOT	13,000	4,400	6,600	24,000
		SGPT	8,000	2,000	3,000	13,000
		Alk	8,000	2,000	3,000	13,000
		Phosphatase	10,000	2,000	3,000	15,000
14	Bilirubin T / D	Bilirubin T / D	13,000	4,400	6,600	24,000
15	SGOT & SGPT	SGOT	8,000	2,000	3,000	13,000
		SGPT	8,000	2,000	3,000	13,000
16	LFT Lengkap	Protein Total	51,000	15,200	22,800	89,000
		Albumin	6,000	2,400	3,600	12,000
		Bilirubin	6,000	2,400	3,600	12,000
		SGOT	13,000	4,400	6,600	24,000
		SGPT	8,000	2,000	3,000	13,000
		Alk	8,000	2,000	3,000	13,000
		Phosphatase	10,000	2,000	3,000	15,000
17	Protein Total	Protein Total	6,000	2,400	3,600	12,000
18	Albumin	Albumin	6,000	2,400	3,600	12,000
19	KGDS / Glukosa	KGDS / Glukosa	11,000	2,000	3,000	16,000
20	KGDN / PP	KGDN / PP	22,000	4,400	6,600	33,000
21	Widal	Widal Test	33,500	3,000	4,500	41,000

22	Elektrolit Darah	Elektrolit Darah	95,000	5,200	7,800	108,000
23	CKMB	CKMB	105,000	8,000	12,000	125,000
24	RA Test (RF)	RA Test (RF)	8,000	1,800	2,700	12,500
25	Asto	Asto	11,000	6,400	9,600	27,000
26	VDRL	VDRL	11,000	1,600	2,400	15,000
27	Hbs Ag	Hbs Ag	30,000	7,200	10,800	48,000
28	Hbs Ab	Hbs Ab	41,000	7,600	11,400	60,000
29	HCV	HCV	40,000	7,600	11,400	59,000
30	Test Kehamilan	Test Kehamilan	9,500	2,200	3,300	15,000
31	Blooding & Clotting Time	Blooding Time Clotting Time	7,000	2,400	3,600	13,000
32	Malaria	Malaria	5,000	2,000	3,000	10,000
33	Faces	Faces	5,500	1,800	2,700	10,000
34	Sputum BTA	Sputum BTA	5,500	1,800	2,700	10,000
35	Analisa Sperma	Analisa Sperma	14,000	2,000	3,000	19,000
36	K O H	K O H	7,000	1,600	2,400	11,000
37	AGDA	AGDA	136,000	7,600	11,400	155,000
38	Aphetamin Test	Aphetamin Test	29,500	3,600	5,400	38,500
39	THC Test	THC Test	29,500	3,600	5,400	38,500
40	Pengubaran Gram	Pengubaran Gram	6,500	1,400	2,100	10,000
41	H I V	H I V	43,000	2,400	3,600	49,000
42	D B D	D B D	70,000	22,000	33,000	125,000
43	Morfologi	Morfologi	31,500	2,800	4,200	38,500

G. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Untuk mendapat SIM	-	Rp. 6,000	Rp. 9,000	Rp. 15,000
2	Untuk melamar kerja	-	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000
3	Untuk surat keterangan sakit, hamil dll	-	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000
4	Visum et repertum kecelakaan	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000
5	Untuk jadi anggota asuransi	-	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 20,000
6	Untuk surat keterangan kesehatan	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000

H. TARIF AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	Supir dan pendamping Ambulance	BBM	Operasional	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota	Rp. 25000	Rp. 17000	-	Rp. 42000
2	Tiap Kilo Meter Di luar Kota Langsa	Rp. 1000	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 4000/km

Ket : Jasa Pelayanan Ambulance

1. Jasa Sopir Rp. 500/km
2. Untuk BBM Rp. 1500/km
3. Jasa Operasional Rp. 2000/km

I. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			Jumlah Tarif
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	
A	Sederhana				
1	Sinus Paranasl	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
2	Mastoid	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
3	Zigomatikum	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
4	Mandi Bula	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
5	TMJ (Temporo Mandibular Join)	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
6	Towne	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
7	Basis Cranium	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
8	Thorax Anak	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
9	Articulatio humerus/shoulder joint	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
10	Clavicula	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
11	Scapula	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
12	Patella	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
13	Articulatio coxae/Hip joint	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 22,500	Rp 62,500
14	Thorax Dewasa	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
15	LLD (Left Lateral Decubitus)	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
16	Sternum	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
17	Pelvis	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
18	BNO/Abdomen	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
19	BNO/Abdomen Ereck	Rp 29,000	Rp 17,000	Rp 25,500	Rp 71,500
B	Sederhana II				

1	USG	Rp 15,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 95,000
C	Sedang				
1	Manus AP/Oblique	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
2	Wrist joint AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
3	Antebrachi AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
4	Elbow joint AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
5	Humerus AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
6	Pedis AP/Oblique	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
7	Ankle joint AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
8	Genu AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
9	Cervical AP/L	Rp 24,000	Rp 30,000	Rp 49,500	Rp 103,500
10	Cruris AP/L	Rp 29,000	Rp 27,000	Rp 42,000	Rp 98,000
11	Femur AP/L	Rp 29,000	Rp 27,000	Rp 42,000	Rp 98,000
D	Canggih I				
1	Scheedel AP/L (2 Posisi)	Rp 44,000	Rp 38,000	Rp 60,000	Rp 142,000
2	Thorax PA/L (2 Posisi)	Rp 54,000	Rp 30,000	Rp 51,000	Rp 135,000
3	Thoracolumbal AP/L (2 Posisi)	Rp 54,000	Rp 30,000	Rp 51,000	Rp 135,000
4	Lumbosacral AP/L(2 Posisi)	Rp 54,000	Rp 30,000	Rp 51,000	Rp 135,000
5	Sacrum AP/L (2 Posisi)	Rp 54,000	Rp 30,000	Rp 51,000	Rp 135,000
E	Canggih II				
1	BNO/Abdomen (3 Posisi)	Rp 79,000	Rp 45,000	Rp 75,000	Rp 199,000

J. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI TERPADU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Fistulografi	Rp. 129,000	Rp. 60,000	Rp. 94,000	Rp. 283,000
2	Apendicogram	Rp. 154,000	Rp. 90,000	Rp. 130,000	Rp. 374,000
3	Barium Osefagus	Rp. 144,000	Rp. 90,000	Rp. 130,000	Rp. 364,000
4	Usus besar/Colom In Loop	Rp. 304,000	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 474,000
5	APG/RPG	Rp. 229,000	Rp. 110,000	Rp. 170,000	Rp. 509,000
6	BNO IVP	Rp. 429,000	Rp. 120,000	Rp. 180,000	Rp. 729,000
7	Cyografi	Rp. 229,000	Rp. 110,000	Rp. 170,000	Rp. 509,000
8	Urethrografi	Rp. 229,000	Rp. 110,000	Rp. 170,000	Rp. 509,000
9	Myelografi	Rp. 429,000	Rp. 135,000	Rp. 200,000	Rp. 764,000
10	OMD	Rp. 154,000	Rp. 180,000	Rp. 275,000	Rp. 609,000
11	HSG	Rp. 189,000	Rp. 135,000	Rp. 200,000	Rp. 524,000
12	Boney Survey	Rp. 274,000	Rp. 255,000	Rp. 385,000	Rp. 914,000

K. PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES

NO.	Jenis tindakan	TOTAL BIAYA
1	Pemeriksaan Kehamilan (4 kali) @ Rp. 10000 per kunjungan	Rp. 40.000
2	Persalinan Normal	Rp. 350.000
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan (3kali) @ Rp.10000 per kunjungan	Rp. 30.000
4	Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp. 100.000
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp. 500.000

Nb. Biaya persalinan mengikuti petunjuk Jampersal Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2011

L. Biaya Tindakan ...

L. Biaya Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Pada Puskesmas dalam Lingkungan Pemerintah Kota Langsa

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan calon jamaah haji	Rp. 97.000	Rp. 100,000	Rp. 123,000	Rp. 320,000

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN I-B :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA RSUD KOTA LANGSA

1. TARIF RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	BHP (Rp)	JRS (Rp)	JPM (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik Umum	4,000	6,000	4,000	14,000
2	Konsultasi gizi dari poli ahli	4,000		5,000	9,000
3	UGD / Day Care	4,000	6,000	4,000	14,000
4	Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum	-	7,200	4,800	12,000
5	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	4,000	7,200	4,800	16,000
6	Langsung ke Poli Ahli tanpa atau rujukan dari Praktek Dokter Swasta	4,000	7,200	4,800	16,000
7	Konsultasi antar Spesialis Rawat Jalan	-		10,000	10,000
8	Konsultasi Spesialis IGD / Rawat Inap	-	15,000	10,000	25,000
9	Poliklinik Ahli	4,000	12,000	8,000	24,000
10	Konsultasi antar Spesialis Rawat Inap		30,000	20,000	50,000
11	Konsultasi lebih dari satu Spesialis		60,000	40,000	100,000

* *Belum Termasuk Obat – Obatan*

2. TARIF RAWAT INAP

No	Kelas	JRS	JPM	Jumlah
1	Kelas Utama A / Super Vip	Rp. 138,000	Rp. 92,000	Rp. 230,000
2	Kelas Utama B / Vip	Rp. 120,000	Rp. 80,000	Rp. 200,000
3	Kelas I	Rp. 90,000	Rp. 60,000	Rp. 150,000
4	Kelas II	Rp. 72,000	Rp. 48,000	Rp. 120,000
5	Kelas III	Rp. 54,000	Rp. 36,000	Rp. 90,000

* *Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat – Obatan, tindakan dan Administrasi*

3. TARIF RAWAT INAP NEONATUS (APABILA IBUNYA DIKELAS)

No	Kelas	JRS	JPM	Jumlah
1	Kelas Utama A / Super Vip	Rp. 69,000	Rp. 46,000	Rp. 115,000
2	Kelas Utama B / Vip	Rp. 60,000	Rp. 40,000	Rp. 100,000
3	Kelas I	Rp. 45,000	Rp. 30,000	Rp. 75,000
4	Kelas II	Rp. 36,000	Rp. 24,000	Rp. 60,000
5	Kelas III	Rp. 27,000	Rp. 18,000	Rp. 45,000

* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat – Obatan, tindakan dan Administrasi

4. TARIF TINDAKAN / PELAYANAN INSTALASI (ICU / ICCU)

No	Jenis Pelayanan	JRS	JPM	Jumlah
1	Rawatan & Visite ICU / ICCU	Rp. 270,000	Rp. 180,000	Rp. 450,000
2	Tindakan / Pelayanan			
	Canulasi Arteril (Art Line)	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 170,000
	Pemasangan Pace Maker (Temporer)	Rp. 350,000	Rp. 500,000	Rp. 850,000
	Vena Sectie	Rp. 43,000	Rp. 70,000	Rp. 113,000
	Dc Shock / Kali	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
	ECG / Kali	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000
	Syringe Pump / Hari	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
	Infusion Pump / Hari	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
	Incubator / Hari	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
	WSD / Hari	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
	Ganti Verband	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
	Pemakaian Obat - obatan Live Saving/Hari	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
3	Tindakan Bantu Pernafasan			
	Intubasi Tracheal	Rp. 90,000	Rp. 130,000	Rp. 220,000
	Extubasi	Rp. 43,000	Rp. 70,000	Rp. 113,000
	Suction / Washing / Hari	Rp. 8,000	Rp. 10,000	Rp. 18,000
4	Insersi Tube / Catheter			
	Insersi NGT	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
	Maag - Cooling	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
	Insersi Urinary Catheter	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000

5. Lain - Lain ...

5	Lain - lain			
	RJPO (Tim Resusitator) Dokter	Rp. 43,000	Rp. 70,000	Rp. 113,000
	Therapy Thrombolitik (Sterptase)	Rp. 63,000	Rp. 90,000	Rp. 153,000
6	Tarif Pemakaian Alat			
	Ventilator	Rp. 105,000	Rp. 150,000	Rp. 255,000
	Nebulizer	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
	Monitoring EKG, PO2, NIBP	Rp. 35,000	Rp. 50,000	Rp. 85,000
	Warm Mattress	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
	Air Mattres	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
	CVP (Pemasangan)	Rp. 250,000	Rp. 1,250,000	Rp.1,500,000
	EX Pelepasan CVP	Rp. 200,000	Rp. 300,000	Rp. 500,000
	Perawatan Luka Bakar >10%	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 170,00
	Blood Warmer	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
	Lumbal Fungsi	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
	Efusi Plure	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000

* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat – Obatan, tindakan dan Administrasi

5. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		Bahan / Alat	JRS	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
A	Sederhana I				
1	Sinus Paranasal	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
2	Mastoid	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
3	Zigomatikum	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
4	Mandi Bula	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
5	TMJ (temporo mandibular joint)	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
6	Towne	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
7	Basis Cranium	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
8	Thorax Anak	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
9	Articulatio humerus/Shoulder joint	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
10	Clavicula	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
11	Scapula	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500

12	Patella	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
13	Articulatio coxae/Hip joint	Rp.24,000	Rp.16,000	Rp.22,500	Rp.62,500
14	Thorax Dewasa	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
15	LLD (left lateral decubitus)	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
16	Sternum	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
17	Pelvis	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
18	BNO/Abdomen	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
19	BNO / Abdomen ereck	Rp.29,000	Rp.17,000	Rp.25,500	Rp.71,500
B	Sederhana II				
1	USG	Rp.15,000	Rp.30,000	Rp.50,000	Rp.95,000
C	Sedang				
1	Manus AP/Oblique	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
2	Wrist joint AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
3	Antebrachi AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
4	Elbow joint AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
5	Humerus AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
6	Pedis AP/Oblique	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
7	Ankle joint AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
8	Genu AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
9	Cervical AP/L	Rp.24,000	Rp.30,000	Rp.49,500	Rp.103,500
10	Cruris AP/L	Rp.29,000	Rp.27,000	Rp.42,000	Rp. 98,000
11	Femur AP/L	Rp.29,000	Rp.27,000	Rp.42,000	Rp. 98,000
D	Canggih I				
1	Scheedel AP/L (2 posisi)	Rp.44,000	Rp.38,000	Rp.60,000	Rp.142,000
2	Thorax PA/L (2 posisi)	Rp.54,000	Rp.30,000	Rp.51,000	Rp.135,000
3	Thoracolumbal AP/L (2 posisi)	Rp.54,000	Rp.30,000	Rp.51,000	Rp.135,000
4	Lumbosacral AP/L (2 posisi)	Rp.54,000	Rp.30,000	Rp.51,000	Rp.135,000
5	Sacrum AP/L (2 posisi)	Rp.54,000	Rp.30,000	Rp.51,000	Rp.135,000
E	Canggih II				
1	BNO/Abdomen (3 posisi)	Rp.79,000	Rp.45,000	Rp.75,000	Rp.199,000

6. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI TERPADU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		Bahan / Alat	JRS	Jasa pelayanan	Jumlah Tarif
1	Fistulografi	Rp.129,000	Rp.60,000	Rp. 94,000	Rp.283,000
2	Apendicogram	Rp.154,000	Rp.90,000	Rp.130,000	Rp.374,000
3	Barium Osefagus	Rp.144,000	Rp.90,000	Rp.130,000	Rp.364,000

4	Usus besar / colon in loop	Rp.304,000	Rp.70,000	Rp.100,000	Rp.474,000
5	APG / RPG	Rp.229,000	Rp.110,000	Rp.170,000	Rp.509,000
6	BNO IVP	Rp.429,000	Rp.120,000	Rp.180,000	Rp.729,000
7	Cystografi	Rp.229,000	Rp.110,000	Rp.170,000	Rp.509,000
8	Urethrografi	Rp.229,000	Rp.110,000	Rp.170,000	Rp.509,000
9	Myelografi	Rp.429,000	Rp.135,000	Rp.200,000	Rp.764,000
10	OMD	Rp.154,000	Rp.180,000	Rp.275,000	Rp.609,000
11	HSG	Rp.189,000	Rp.135,000	Rp.200,000	Rp.524,000
12	Boney survey	Rp.274,000	Rp.255,000	Rp.385,000	Rp.914,000

7. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI KHUSUS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		Bahan / Alat	JRS	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	CT scan head / kepala (tanpa kontras)	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
2	CT scan head dengan LV contrast	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
3	CT scan sinus paranasal	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
4	CT scan mastoid	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
5	CT scan thyroid	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
6	CT scan neck/Larynx	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
7	CT scan nasoparing	Rp. 100,0000	Rp. 220,000	Rp. 330,000	Rp. 650,000
8	CT scan spine/vertebra (3-4 corpus)	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
9	CT scan abdomen (upper)	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
10	CT scan abdomen lower	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
11	CT scan abdomen upper + lower	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
12	CT scan abdomen dengan LV contrast	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
13	CT scan thorax	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
14	CT scan thorax/upper abdomen dgn LV contrast	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000

15	CT mammografi	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
16	CT nyelografi	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000
17	CT extermitas	Rp. 100,0000	Rp. 300,000	Rp. 450,000	Rp. 850,000

- *Belum Termasuk Obat - Obatan*

8. TARIF TINDAKAN IGD

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa RS		
A	Kecil I				
1	Eksplorasi Luka Bakar	Rp. 15,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 113,000
2	Incisi Abses	Rp. 10,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 108,000
3	Vena Seksi	Rp. 30,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 128,000
4	Kadedo Ekstraksi (Sedikit)	Rp. 10,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 108,000
5	Elektro Kauterisasi	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
6	Eulkeasi Moluskum Kontragia Sum (Sedikit)	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
7	Bedah Beku (N2 Cair)	Rp. 30,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 128,000
8	Cabut Gigi Satu Buah	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
9	Tambal Gigi	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
10	Vutal Amputasi	Rp. 20,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 118,000
11	Pengisian Saluran Akar Dengan Gutta-Percha Point	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
12	Pumpa Silikat / Amalgam Satu Bidang	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
13	Eextraksi Batu Dimuara Urethra	Rp. 10,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 108,000
14	Incisi Abses Peritonsiler	Rp. 10,000	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 108,000
15	Enukleasi Moluskum Kontagiosum (Jumlah Sedang)	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
16	Komedo Ektrakso (Banyak)	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
17	Bedah Buku N2 Cair (Banyak)	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
18	Cabut Gigi Permanen	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
19	Pembersih Karang Gigi	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
20	Tumpatan Amalgam Dua Bidang	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
21	Composite Resin Kecil	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
22	Scalling Abses Fungsi	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
23	Incisi Operculam	-	Rp. 38,000	Rp. 60,000	Rp. 98,000
24	Pasang Spalet	Rp. 30,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 110,000
25	Heating < 5 cm	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 100,000
B	Kecil II				
1	Repair Trauma Amputasi Jari	Rp. 30,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 230,000
2	Heating >5 cm	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000	Rp. 160,000

3	Cirkumsisi	Rp. 30,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 230,000
4	Eksterpasi Corpus Alienum	Rp. 20,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 220,000
5	Ekstraksi Kuku	Rp. 20,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 220,000
6	Eksplorasi Luka	Rp. 20,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 220,000
7	Episiotomi	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
8	Venaseksi Anastesi Anak	Rp. 40,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 240,000
9	Elektro Cateterisasi : Vorcuca Vugaris	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
10	Elektro Cateterisasi : Kurettage	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
11	Eksterpasi / Eksisi : Mevus Pigmentosus	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
12	Fungsi Sinus	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
13	Ekstraksi polip telinga	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
14	Nektoromi	Rp. 20,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 220,000
15	Enukleasi moluskum kontagiosum(Banyak)	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
16	Tumpatan Composit Resin Besar	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
17	Pencabutan sisi dengan Komplikasi	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
18	Jahitan Luka Bakar pada Vagina (vulva)	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
19	scunder Heaching	Rp. 40,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 240,000
20	Repair seperti oral plastik	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
21	buka Gips	Rp. 30,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 230,000
22	Ekstraksi Corpus alienum Cornea	Rp. 10,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 210,000
23	Ekstraksi Kalsium Okslat	-	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000
24	Eksisi / Ekstirpasi (dibadan)	Rp. 40,000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 290,000
25	Pasang Gips	Rp. 50,000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 380,000
C	Kecil III				
1	Gips Panjang Sampai Tangkai	Rp. 40,000	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 325,000
2	Jahit Luka Palpebra / > 5 cm	Rp. 20,000	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 305,000
3	Tracheotomi	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
4	Eksterpasi Tumor Vagina (Vulva)	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
5	Ekstraksi Polip Hidung	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
6	Operasi Kosmetik	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
7	Gips Reposisi Untuk Kelainan	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
8	PESEG Varus	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000

9	Subociptal Myelography	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
10	Eksisi / Eksterpasi (Dimuka)	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
11	Odontectomy Mudah	-	Rp. 110,000	Rp. 175,000	Rp. 285,000
D	Kecil IV				
1	Odontectomy Super	-	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 580,000
2	Apek Reseksi	-	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 580,000
3	Eksterpasi Epulis	-	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 580,000
4	Esis Biopsi	-	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 580,000
5	Fremectomy Kista Kecil	-	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 580,000
6	Aspirasi Cairan Pleura	Rp. 20,000	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 600,000
7	Spulling	Rp. 20,000	Rp. 230,000	Rp. 350,000	Rp. 600,000
8	Eksterpasi / Eksisi : Fibroma Molle	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000
9	Eksterpasi / Eksisi : Cyste Atheroom	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000
10	Eksterpasi / Eksisi : Neuro Fibroma	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000
11	Eksterpasi / Eksisi : Atheroom	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000
12	Extirpasi Kista Atheroom	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000
13	W. S. D	Rp. 40,000	Rp. 210,000	Rp. 350,000	Rp. 600,000

* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat – Obatan, tindakan dan Administrasi

9. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik	Jumlah Tarif	Ket.
		Bahan/ Alat	Jasa RS			
A	Poliklinik Mata					
1	Epilasi	Rp. 6,500	Rp. 34,000	Rp. 51,000	Rp. 91,500	
2	Spulling	Rp. 6,500	Rp. 34,000	Rp. 51,000	Rp. 91,500	
3	Extrasi Corpus Aleneum	Rp. 13,000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 263,000	
4	Tonometri / Analtest	-	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	
5	Spulling + Scriping	Rp. 13,000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 263,000	
6	Extrasi Pterygium	Rp. 26,000	Rp. 270,000	Rp. 390,000	Rp. 686,000	
7	Insisi Chalazion	Rp. 26,000	Rp. 270,000	Rp. 390,000	Rp. 686,000	
8	Koreksi KM	Rp. 9,000	Rp. 21,000	Rp. 35,000	Rp. 65,000	
B	Poliklinik Kebidanan dan Kandungan					

1	Vagina Tuse	Rp. 5,000	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 38,000	
2	USG	Rp. 15,000	Rp. 21,000	Rp. 35,000	Rp. 71,000	
C	Poliklinik Bedah					
1	FAM	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000	
2	Lifoma	Rp. 40,000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000	
3	Insisi /Tampon Abces	Rp. 50,000	Rp. 135,000	Rp. 200,000	Rp. 385,000	
4	Buka Gips/	Rp. 30.000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 230,000	
5	Keloid	Rp. 40.000	Rp. 205,000	Rp. 300,000	Rp. 545,000	
6	STT	Rp. 40.000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000	
7	Ganglion	Rp. 40.000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000	
8	GV. Gangren/ Debridement	Rp. 50.000	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 220,000	
9	Circumsisi	Rp. 40.000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 370,000	
10	Clapus	Rp. 40.000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 625,000	
11	Exterpasi Kuku	Rp. 20.000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 220,000	
12	Pasang cateter (Mandrin)	Rp. 50.000	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 220,000	
13	Corpus	Rp. 40.000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 370,000	
14	Ap Heating	Rp. 20.000	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 53,000	
15	Busi	Rp. 30.000	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 200,000	
16	GV. Post Operasi	Rp. 30.000	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 85,000	
17	Pasang Gips	Rp. 50.000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 380,000	
18	Pasang Spalek	Rp. 30.000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 110,000	
19	Exsisi	Rp. 40.000	Rp. 235,000	Rp. 350,000	Rp. 625,000	
20	Ap Screw	Rp. 40.000	Rp. 130,000	Rp. 200,000	Rp. 370,000	
21	Exterpasi	Rp. 40.000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 290,000	
D	Poliklinik THT					
1	Tampon Telinga	Rp. 5,000	Rp. 33,000	Rp. 50,000	Rp. 88,000	
2	Section Besar	Rp. 5,000	Rp. 33,000	Rp. 50,000	Rp. 88,000	
3	GV Besar	Rp. 5,000	Rp. 33,000	Rp. 50,000	Rp. 88,000	
4	Extraksi Serumen Dua Telinga	Rp. 5,000	Rp. 33,000	Rp. 50,000	Rp. 88,000	
5	Corpus Aleunum	Rp. 10,000	Rp. 70,000	Rp. 100,000	Rp. 180,000	
6	Tampon Hidung	Rp. 20,000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 270,000	
7	Belloque Tampon	Rp. 20,000	Rp. 205,000	Rp. 300,000	Rp. 525,000	
8	Section Kecil	-	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	

9	GV Kecil	Rp. 5,000	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 22,000	
10	Ekstraksi Serumen Satu Telinga	Rp. 5,000	Rp. 16,000	Rp. 25,000	Rp. 46,000	
11	Endoscopy/ Laryngoscopy	-	-	-	-	
12	Insisi Abses Septum	Rp. 20.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	Rp. 440,000	
13	Ekstraksi Grabulasi LT	Rp. 20.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	Rp. 440,000	
14	Ekstraksi Polip/Cysta Cavun Nasi	Rp. 20.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	Rp. 440,000	
15	Insisi othematom	Rp. 20.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	Rp. 440,000	
16	Insisi Abses Peritonsiler	Rp. 20.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	Rp. 440,000	
E	Poliklinik Paru					
1	Peak Flow	Rp. 6,500	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 71,500	
2	Spirometri	Rp. 6,500	Rp. 43,000	Rp. 65,000	Rp. 114,500	
3	Nebulizer	Rp. 6,500	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 71,500	
4	Proff Punctie Pleura	Rp. 6,500	Rp. 33,000	Rp. 50,000	Rp. 89,500	
5	Aspirasi Cairan Pleura	Rp. 13,000	Rp. 100,000	Rp. 150,000	Rp. 263,000	
F	Poliklinik Gigi dan Mulut					
1	Alveolectomi/ Element	Rp. 5,000	Rp. 12,000	Rp. 18,000	Rp. 35,000	
2	Exodonti dgn Blok Anastesi dgn Komplikasi	Rp. 4,000	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 46,000	
3	Exodonti dgn Blok Anastesi Tanpa Komplikasi	Rp. 2,000	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 35,000	
4	Exodonti dgn Chlorethil	Rp. 1,500	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 18,500	
5	Exodonti dgn Infiltrasi	Rp. 2,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 27,000	
6	Exodonti Impacted Kelas I	Rp. 6,000	Rp. 30,000	Rp. 47,000	Rp. 83,000	
7	Exodonti Impacted Kelas II	Rp. 13,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 213,000	
8	Incisi Eksternal	Rp. 3,500	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 28,500	
9	Incisi Internal	Rp. 3,500	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 28,500	
10	Premedikasi	Rp. 1,500	Rp. 1,000	Rp. 3,000	Rp. 5,500	
11	RO Photo	Rp. 6,500	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 48,500	

12	Scaling	Rp. 3,000	Rp. 22,000	Rp. 35,000	Rp. 60,000	
13	Tindakan dgn Infiltrasi dgn Peri Coronitis	Rp. 3,000	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 36,000	
14	Tindakan dgn Infiltrasi dgn Epulis	Rp. 6,500	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 106,500	
15	Tindakan dgn Infiltrasi dgn Socket	Rp. 2,500	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 35,500	
16	Tambalan Sementara	Rp. 1,200	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 18,200	
17	Tambalan Tetap Amalgam	Rp. 2,500	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 18,200	
18	Tumpatan Tetap Silicate	Rp. 2,500	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 18,200	
H	<u>Poliklinik Jantung</u>					
1	EKG	Rp. 6,000	Rp. 16,000	Rp. 23,000	Rp. 45,000	
2	EKG A4	Rp. 10,000	Rp. 28,500	Rp. 45,500	Rp. 84,000	
3	Echo	Rp. 70,000	Rp. 177,000	Rp. 266,000	Rp. 513,000	
4	Tridmill	Rp. 50,000	Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 250,000	
I	<u>Poliklinik Anak</u>					
1	Injeksi Sub Cutan	Rp. 5,000	Rp. 4,500	Rp. 7,500	Rp. 17,000	
4	Tindik	Rp. 5,000	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 38,000	
6	Rectal Tuse Microlac Sup	Rp. 5,000	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 22,000	
7	Rectal Tuse Stesolid Sup	Rp. 5,000	Rp. 7,000	Rp. 10,000	Rp. 22,000	
J	<u>Poliklinik Psikologi</u>					
1	Konseling	-	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000	
2	Tes Kepribadian	-	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000	
3	Tes IQ	-	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000	
K	TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI					
	Konsultasi Gizi	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	
L	<u>Poliklinik Neorologi</u>					
A	PAKET II C					
	- Fundus Copy	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	
	- Free Field test	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	
PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET						
1	Terapi Reposisi Otolit	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	
2	Test Keseimbangan	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	

	Sederhana					
3	Test Keseimbangan dengan Fronzel	-	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	
4	USG Crotis / Doppler	-	Rp. 120,000	Rp. 180,000	Rp. 300,000	
5	USG Musculo Slectef	-	Rp. 52,000	Rp. 78,000	Rp. 130,000	
6	EEG	-	Rp. 76,000	Rp. 114,000	Rp. 190,000	
7	Brain Mopping	-	Rp. 144,000	Rp. 216,000	Rp. 360,000	
TINDAKAN PAKET IIIA						
1	Assment Fungsi Memory		Rp. 21,000	Rp. 32,000	Rp. 53,000	
2	Assment Fungsi Kekuatan Otot		Rp. 21,000	Rp. 32,000	Rp. 53,000	
3	Assment Fungsi Fanisi		Rp. 21,000	Rp. 32,000	Rp. 53,000	
4	Assment Sensibilitas		Rp. 21,000	Rp. 32,000	Rp. 53,000	
5	Assment Fungsi Lutut		Rp. 21,000	Rp. 32,000	Rp. 53,000	
TINDAKAN PAKET III B						
1	Injeksi Trigar Pain		Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000	
2	Fungsi PUNKSI Lumbal		Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000	
3	Injeksi Botox		Rp. 80,000	Rp. 120,000	Rp. 200,000	
M	Poliklinik Jiwa					
1	Visum berhubungan dengan gangguan jiwa(paket observasi selama 14 hari)	Rp. 15,000	Rp. 52,000	Rp. 78,000	Rp. 145,000	
2	Tes Kesehatan Jiwa	Rp. 10,000	Rp. 24,000	Rp. 36,000	Rp. 70,000	
3	Psikoterapi	-	Rp. 12,000	Rp. 18,000	Rp. 30,000	
4	Pemeriksaan tes psikiatri untuk mendukung diagnosa seperti:HAM A, HAM D, BPRS, PANSS, MMSE, BDI, dll	Rp. 5,000	Rp. 12,000	Rp. 18,000	Rp. 35,000	

* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat - Obatan dan Administrasi

10. TARIF TINDAKAN MEDICAL INTERVENTION

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		
		Jasa RS	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
A	Kecil			
1	Suction	Rp. 8,000	Rp. 10,000	Rp. 18,000
2	Injeksi / hari	Rp. 8,000	Rp. 10,000	Rp. 18,000
3	Skin Traction	Rp. 8,000	Rp. 10,000	Rp. 18,000
4	Papsmear	Rp. 8,000	Rp. 10,000	Rp. 18,000
5	Pasang Schorsteen	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
6	Corpus Alienum Hidung	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
7	Corpus Alienum Telinga	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
8	Peak Flow Metri	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
9	Pasang Infus	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
10	Pasang NGT	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
11	Tambon Hidung	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
12	Pasang Gips tanpa Narkose	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
13	Ganti Verband (Kecil)	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
14	Cateter Biasa	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
15	Pasang Gudel	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
16	Clysm	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
17	Dressing Sedikit	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
18	Caustik Hidung	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
19	Irigasi Telinga	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
20	Parasentese Telinga	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
21	Pasang Maag Selang	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
22	Dressing Banyak	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
23	Pasang Skeletel Traksi	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
24	Pasang Wing Nedl	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
25	Force Arm Slab	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
26	U-Slab	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
27	Robert Jones Bandage	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
28	Figure Of 8 Bandage	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000

29	Wedging	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
30	Biopsi Jaringan	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
31	Pasang / Cabut IUD	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
32	Pasang Orophrayngeal Airway	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
33	Perawatan Tali Pusar Bayi	Rp. 13,000	Rp. 20,000	Rp. 33,000
34	Infution Pump	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
35	Syrings Pump	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000
B	Sedang			
1	Nebulizer	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
2	Reposisi Tertutup Pasang Gips dengan Narkose	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
3	Ganti Verband (Sedang)	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
4	Intubasi	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
5	Plura Puctie	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
6	Blass Puchtic	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
7	Kateterisasi pada Recatio	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
8	Urine	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
9	Lumbal Fungsi	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
10	B.M.P	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
11	Subdural T.A.P	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
12	Silactsi	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
13	Tampon Bellogque	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
14	Aspirasi Sendi	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
15	Pertubase	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
16	Hidroturbasi	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
17	Kolpascopy	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
18	Kardie Otography	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
19	Past Coital Test	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
20	Geryo Surgery	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
21	Test Fistel Methylin Blue Tesim	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
22	Blue Light Theraphy	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
23	Long Arm Plaster	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000

24	Hangin Cast	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
25	Simple Implant Remeval	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
26	Pasang / Angkat Susuk KB	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
27	Blanketrol	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
28	Kalpotomi Posterior	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
29	Aminoscopy	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
30	Inkubator	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 65,000
C	Besar			
1	Cuci Lambung	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
2	Pasang ETT	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
3	RJP	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
4	Matras Anti Decubitus	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
5	Syrings Pump	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
6	Tranfusi Ganti	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
7	Infution Pump	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
8	Resussutasi Kardio Pulmonum	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
9	Puctie	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
10	Pasang Body Gasi	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
11	Pasang Hemnpika	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
12	Shoulder Spica	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
13	Hip Spica	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
14	Balance Traction	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
15	Pelvic / Lambal Traction	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
16	C P M	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
17	Enukleasi Kista Bartolini	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
18	Heating Besar	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
19	Kumbah Vagina	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 80,000
D	Khusus			
1	Bodu Jacket	Rp. 65,000	Rp. 90,000	Rp. 155,000
2	Minerva Jacket	Rp. 65,000	Rp. 90,000	Rp. 155,000
3	Scoliasis (EDF) Plaster	Rp. 65,000	Rp. 90,000	Rp. 155,000

4	Pasang CVP	Rp. 65,000	Rp. 90,000	Rp. 155,000
---	------------	------------	------------	-------------

* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat - Obatan dan Administrasi

11. TARIF PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan/ Medik	Jumlah Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1	Perawatan Jenazah bedah mayat	Rp. 450,000	Rp. 100,000	Rp.150,000	Rp. 700,000
2	Perawatan jenazah (Fardhu Kifayah)	Rp. 215,000	Rp. 170,000	Rp.250,000	Rp. 635,000
3	Penyimpanan Jenazah (di hitung perhari, paling lama 3 x 24 jam)	-	Rp. 17,000	Rp. 25,000	Rp. 42,000

12. TARIF BIAYA PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	Supir dan pendamping Ambulance	BBM	Operasional	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota	Rp. 25.000	Rp. 17.000	-	Rp. 42.000
2	Tiap Kilo Meter Di luar Kota Langsa	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 4.000/km

Ket : Jasa Pelayanan Ambulance

1. Jasa Sopir Rp. 500/km
2. Untuk BBM Rp. 1.500/km
3. Jasa Operasional Rp. 2.000/km

13. TARIF PEMERIKSAAN UNTUK SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan/ Medik	Jumlah Tarif
		Bahan	Jasa RS		
1	Kir Umum	Rp. 5,000	Rp. 6,000	Rp. 9,000	Rp. 20,000
2	Untuk Gol I,II (PNS)	Rp. 5,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000
3	Untuk Gol III (PNS)	Rp. 5,000	Rp. 24,000	Rp. 36,000	Rp. 65,000
4	Untuk Visum et Repertum				
	a. Pro Justicia	-	Rp. 16,000	Rp. 24,000	Rp. 40,000
	b. Keperluan lainnya	-	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 20,000
5	Untuk Asuransi	-	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000
6	Untuk Pendidikan	-	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 20,000
7	Administrasi SKO	Rp. 1,000	Rp. 3,600	Rp. 2,400	Rp. 7,000

14. TARIF TINDAKAN ...

14. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian	BHP	JRS	JPM	Jumlah
1	Darah Routine	-	Rp. 34,000	Rp. 8,000	Rp. 16,000	Rp. 58,000
		Haemoglobin	Rp. 5,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 8,500
		Lecocyte	Rp. 4,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 7,500
		Haematocyt	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 7,000
		Erytrocyt	Rp. 4,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 7,500
		Laju Endap Darah	Rp. 3,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 6,500
		Trombocyte	Rp. 3,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 6,500
		Blood Grop	Rp. 3,500	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 6,500
		Dift Conent	Rp. 5,000	Rp. 1,000	Rp. 2,000	Rp. 8,000
2	HB Ulang / Darah Routine Ulang	HB Ulang Haemoglobin Lecocyte Haematocyt Erytrocyt Trombocyte	Rp. 22,500	Rp. 5,000	Rp. 7,500	Rp. 35,000
3	Laju Endap Darah	Laju Endap Darah	Rp. 3,500	Rp. 1,400	Rp. 2,100	Rp. 7,000
4	Blood Grop	Blood Grop	Rp. 3,500	Rp. 1,000	Rp. 1,500	Rp. 6,000
5	Dift Conent	Dift Conent	Rp. 5,000	Rp. 1,200	Rp. 1,800	Rp. 8,000
6	Urine	Urine	Rp. 7,000	Rp. 1,600	Rp. 2,400	Rp. 11,000
7	Lipid Profile	Trigly Cerida	Rp. 78,500	Rp. 12,200	Rp. 18,300	Rp. 109,000
		Cholesterol	Rp. 33,000	Rp. 7,600	Rp. 11,400	Rp. 52,000
		HD	Rp. 12,500	Rp. 2,200	Rp. 3,300	Rp. 18,000
		Cholesterol	Rp. 33,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 39,000
8	Trigly Cerida	Trigly Cerida	Rp. 33,000	Rp. 7,600	Rp. 11,400	Rp. 52,000
9	Cholesterol	Cholesterol	Rp. 12,500	Rp. 2,200	Rp. 3,300	Rp. 18,000
10	RFT	Urium Creatinin Uric Acia	Rp. 60,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 80,000
11	Urium & Creatinin	Urium Creatinin	Rp. 36,000	Rp. 5,600	Rp. 8,400	Rp. 50,000
12	Uric Acid	Uric Acid	Rp. 24,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 30,000
13	LFT	Bilirubin T / D	Rp. 39,000	Rp. 10,400	Rp. 15,600	Rp. 65,000
			Rp. 13,000	Rp. 4,400	Rp. 6,600	Rp. 24,000

		SGOT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
		SGPT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
		Alk Phosphatase	Rp. 10,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 15,000
14	Bilirubin T / D	Bilirubin T / D	Rp. 13,000	Rp. 4,400	Rp. 6,600	Rp. 24,000
15	SGOT & SGPT	SGOT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
		SGPT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
16	LFT Lengkap	Protein Total	Rp. 51,000	Rp. 15,200	Rp. 22,800	Rp. 89,000
		Albumin	Rp. 6,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 12,000
		Bilirubin	Rp. 6,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 12,000
		Bilirubin	Rp. 13,000	Rp. 4,400	Rp. 6,600	Rp. 24,000
		SGOT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
		SGPT	Rp. 8,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 13,000
		Alk Phosphatase	Rp. 10,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 15,000
17	Protein Total	Protein Total	Rp. 6,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 12,000
18	Albumin	Albumin	Rp. 6,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 12,000
19	KGDS / Glukosa	KGDS / Glukosa	Rp. 11,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 16,000
20	KGDN / PP	KGDN / PP	Rp. 22,000	Rp. 4,400	Rp. 6,600	Rp. 33,000
21	Widal	Widal Test	Rp. 33,500	Rp. 3,000	Rp. 4,500	Rp. 41,000
22	Elektrolit Darah	Elektrolit Darah	Rp. 95,000	Rp. 5,200	Rp. 7,800	Rp. 108,000
23	CKMB	CKMB	Rp. 105,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 125,000
24	RA Test (RF)	RA Test (RF)	Rp. 8,000	Rp. 1,800	Rp. 2,700	Rp. 12,500
25	Asto	Asto	Rp. 11,000	Rp. 6,400	Rp. 9,600	Rp. 27,000
26	VDRL	VDRL	Rp. 11,000	Rp. 1,600	Rp. 2,400	Rp. 15,000
27	Hbs Ag	Hbs Ag	Rp. 30,000	Rp. 7,200	Rp. 10,800	Rp. 48,000
28	Hbs Ab	Hbs Ab	Rp. 41,000	Rp. 7,600	Rp. 11,400	Rp. 60,000
29	HCV	HCV	Rp. 40,000	Rp. 7,600	Rp. 11,400	Rp. 59,000
30	Test Kehamilan	Test Kehamilan	Rp. 9,500	Rp. 2,200	Rp. 3,300	Rp. 15,000
31	Blooding & Clotting Time		Rp. 7,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 13,000

		Bleeding Time Clotting Time				
32	Malaria	Malaria	Rp. 5,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 10,000
33	Faces	Faces	Rp. 5,500	Rp. 1,800	Rp. 2,700	Rp. 10,000
34	Sputum BTA	Sputum BTA	Rp. 5,500	Rp. 1,800	Rp. 2,700	Rp. 10,000
35	Analisa Sperma	Analisa Sperma	Rp. 14,000	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 19,000
36	K O H	K O H	Rp. 7,000	Rp. 1,600	Rp. 2,400	Rp. 11,000
37	AGDA	AGDA	Rp. 136,000	Rp. 7,600	Rp. 11,400	Rp. 155,000
38	Aphetamin Test	Aphetamin Test	Rp. 29,500	Rp. 3,600	Rp. 5,400	Rp. 38,500
39	THC Test	THC Test	Rp. 29,500	Rp. 3,600	Rp. 5,400	Rp. 38,500
40	Pengubaran Gram	Pengubaran Gram	Rp. 6,500	Rp. 1,400	Rp. 2,100	Rp. 10,000
41	H I V	H I V	Rp. 43,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 49,000
42	D B D	D B D	Rp. 70,000	Rp. 22,000	Rp. 33,000	Rp. 125,000
43	Morfologi	Morfologi	Rp. 31,500	Rp. 2,800	Rp. 4,200	Rp. 38,500

15. TARIF UNTUK FILM CIAR / COMPUTER RADIOTRAPHI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		Bahan / Alat	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
A	Sederhana I				
1	Sinus Paranasal	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
2	Mastoid	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
3	Zigomatikum	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
4	Mandi Bula	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
5	TMJ (temporo mandibular joint)	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
6	Towne	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
7	Basis Cranium	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
8	Thorax Anak	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
9	Articulatio	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000

10	humerus/Shoulder joint Clavicula	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
11	Scapula	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
12	Patella	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
13	Articulatio coxae/Hip joint	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
14	Thorax Dewasa	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
15	LLD (left lateral decubitus)	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
16	Sternum	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
17	Pelvis	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
18	BNO/Abdomen	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
19	BNO / Abdomen ereck	Rp. 60,000	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 110,000
B	Sederhana II				
1	USG	Rp. 15,000	Rp. 21,000	Rp. 35,000	Rp. 71,000
C	Sedang				
1	Manus AP/Oblique	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
2	Wrist joint AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
3	Antebrachi AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
4	Elbow joint AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
5	Humerus AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
6	Pedis AP/Oblique	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
7	Ankle joint AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
8	Genu AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
9	Cervical AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
10	Cruris AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
11	Femur AP/L	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
D	Canggih I				
1	Scheedel AP/L (2 posisi)	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
2	Thorax PA/L (2 posisi)	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
3	Thoracolumbal AP/L (2 posisi)	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
4	Lumbosacral AP/L (2 posisi)	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000
5	Sacrum AP/L (2 posisi)	Rp.120,000	Rp. 40,000	Rp. 60,000	Rp. 220,000

LAMPIRAN II:
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS	JUMLAH TARIF	
		WNI	WNA
1	Penerbitan KTP - Permohonan Baru - Perpanjangan	Rp. 7.500,-	Rp. 50.000,-
		Rp. 7.500,-	Rp. 50.000,-
2	Penerbitan KK - Permohonan Baru - Perpanjangan	Rp. 7.500,-	Rp. 100.000,-
		Rp. 7.500,-	Rp. 100.000,-
3	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	-	Rp. 100.000,-
4	Surat Keterangan Pindah Datang	Rp. 10.000,-	Rp. 100.000,-
5	Kartu Identitas Penduduk Musiman	-	Rp. 100.000,-
6	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 100.000,-
7	Kartu Identitas Kerja	Rp. 10.000,-	Rp. 100.000,-
8	Salinan biaya cetak meliputi :		
	1. Akta Perkawinan (AP)	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Akta Perceraian (AC)	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-
	3. Akta Pengesahan, Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak meliputi		
	a. Pengesahan anak	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Pengakuan Anak	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
c. Pengangkatan Anak	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
4. Akta Ganti Nama (AGN)	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	
5. Akta Kematian (AKM)	Rp. 75.000,-	Rp. 200.000,-	

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN III :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis kendaraan	Tarif
1	Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya	Rp. 5.000/1 kali parkir
2	Bus, truck, dan sejenisnya	Rp. 3.000/1 kali parkir
3	Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya	Rp. 1.000/1 kali parkir
4	Sepeda Motor	Rp. 500/1 kali parkir
5	Tarif Langganan (Abodemen) per bulan : - Untuk kendaraan roda empat - Untuk sepeda motor - Untuk becak	Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IV :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KELAS	LOKASI PEMANFAATAN FASILITAS	LUAS BANGUNAN (M2)	TARIF/HARI
I	KIOS	1 s/d 3 4 s/d 6 7 s/d 9 10 s/d 15 16 s/d 20 Di atas 20	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
II	LOSD	1 s/d 2 2 s/d 5 Di atas 5	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-
III	- Pelataran Pasar - Pedagang Kaki Lima - Gerobak Jajan dan sejenisnya		Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-
IV	Pelataran Untuk Titip Kendaraan - Sepeda Motor - Truck, Bus dan sejenisnya - Sedan, mini bus, pick up, dan sejenisnya - Gerobak, becak dan sejenisnya		Rp. 1000,- Rp. 5000,- Rp. 2000,- Rp. 500,-
V	Tarif Abodemen untuk: - Penitipan kendaraan roda 4 perbulan - Penitipan Kendaraan roda 2 perbulan		Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN V :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

- a. Pengujian Berkala yang pertama kali meliputi :
1. Mobil Barang ,Mobil Bus, Tractor Head, terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 14.000,-
Tanda uji (sepasang)	Rp. 10.000,-
Buku uji	Rp. 10.000,-
Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp. 10.000,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 14.000,-
Tanda uji (sepasang)	Rp. 10.000,-
Buku uji	Rp. 10.000,-
Pengecatan tanda uji samping & nomor uji	Rp. 10.000,-
- b. Pengujian Berkala yang meliputi :
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, yang terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 14.000,-
Tanda uji (sepasang)	Rp. 10.000,-
Buku uji	Rp. 10.000,-
Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp. 10.000,-
Uji asap	Rp. 10.000,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 10.000,-
Tanda uji (sepasang)	Rp. 10.000,-
Buku uji	Rp. 10.000,-
Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp. 10.000,-
Uji asap	Rp. 10.000,-
- c. Penilaian Kondisi Teknis kendaraan :
1. Mobil Barang, Mobil Bus Rp. 51.000,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 36.000,-
- d. Penggantian Buku Uji yang Hilang Rp. 25.000,-
- e. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang Rp. 20.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN VI :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis hydrant per titik/tahun adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran jenis sprinkler per titik/ tahun adalah sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran pada kendaraan roda empat/tahun adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- d. Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran pada kendaraan roda enam atau lebih /tahun adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis satuan air bertekanan per buah/ tahun adalah :
 1. 1 liter s/d 9 liter Rp 2.000 / tabung
 2. Lebih dari 9 liter Rp 2.500 / tabung
- f. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api per tabung/tahun adalah :
 1. Jenis Dry Chemical :
 - 1 kg s/d 3,5 kg Rp 2.000 / tabung
 - 3,5 kg s/d 6 kg Rp 2.500 / tabung
 - 6 kg s/d 15 kg Rp 3.000 / tabung
 - lebih dari 15 kg Rp 7.000 / tabung
 2. Jenis Carbon Dioksida (CO2)
 - 1 kg s/d 3 kg Rp 2.000 / tabung
 - 3 kg s/d 6 kg Rp 2.500 / tabung
 - lebih dari 6 kg Rp 5.000 / tabung
 3. Jenis Foam/Busa
 - 1 kg s/d 9 liter Rp 2.000 / tabung
 - lebih dari 9 kg Rp 2.500 / tabung

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN VII :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS	BENTUK					
		CETAK (UKURAN) dan TARIF (Rp)					
		DIGITAL	A0 (1X1,2M)	A1 (1X0,6M)	A2 (0,5X0,5M)	A3 (0,5X0,3M)	A4 (0,25X0,3M)
1	Peta foto	500.000,-	150.000,-	120.000,-	90.000,-	60.000,-	60.000,-
2	Peta dasar	400.000,-	150.000,-	120.000,-	90.000,-	60.000,-	60.000,-
3	Peta Tematik	300.000,-	150.000,-	120.000,-	90.000,-	60.000,-	60.000,-
4	Peta Teknis	300.000,-	150.000,-	120.000,-	90.000,-	60.000,-	60.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN VIII :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

- a. Jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik);
- b. Jasa pelayanan pembuangan air kotor/tinja ke IPLT yang penyedotannya dilakukan oleh pihak swasta dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000/m³ (dua puluh lima ribu rupiah per meter kubik) ;
- c. Jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja yang berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) dari Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000/km (lima ribu rupiah per kilometer).

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IX :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Bimbingan Teknis 1 s/d 3 hari	orang	Rp. 15.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis / Fungsional		
	a. 4 s/d 7 hari	orang	Rp. 25.000,-
	b. 8 s/ d 15 hari	orang	Rp. 30.000,-
	c. Diatas 15 hari	orang	Rp. 50.000,-
3.	Kursus		
	a. 1 s/d 7 hari	orang	Rp. 15.000,-
	b. 8 s/ d 15 hari	orang	Rp. 30.000,-
	c. Diatas 15 hari	orang	Rp. 50.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Qanun yang mengacu kepada ketentuan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang -Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota hanya memungut 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Qanun ini. Sedangkan 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Umum lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan belum diatur dalam Qanun ini.

Ada 2 (dua) jenis Retribusi Jasa Umum baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang potensinya di wilayah Daerah cukup banyak.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 321

25. TARIF SEWA GEDUNG AULA RSUD KOTA LANGSA

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	TARIF RSUD LANGSA		
		JASA RS (RP)	JASA PELAYANAN	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5
1	SEWA GEDUNG AULA / HARI		Rp 240.000	Rp 240.000
TARIF PRAKTEK DI RSUD LANGSA DARI LUAR DAERAH				
1	PRAKTEK MAHASISWA KEDOKTERAN / THN	Rp 12.000.000	Rp 8.000.000	Rp 20.000.000
2	PRAKTEK MAHASISWA S1,D III KESEHATAN SERTA SEKOLAH LAIN / PRODI / THN	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 10.000.000